



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 77 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026 dengan susunan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA. : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang  
pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 77 /KEP/BPP/2026  
TANGGAL 20 FEBRUARI 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2026

PEMBAGIAN BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU

- a. Penetapan Bidang masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) berdasarkan bidang yaitu :

1. Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup meliputi administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan bina marga, cipta karya dan tata ruang, permukiman, pengairan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, dan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

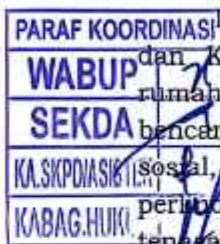
2. Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian.

Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi, aset daerah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dana transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit serta badan layanan umum daerah, penanggulangan bencana dan kebakaran, keluarga berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan masyarakat nagari, reformasi birokrasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Nagari.



Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Nagari meliputi pelaksanaan pengawasan intern terhadap pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat nagari, kecamatan, Nagari, BUMnag, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat.

Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat melakukan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan tujuan tertentu atas permintaan dan pengaduan masyarakat, audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Masing-masing Irban Pembantu Daerah:

1. Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- c) Dinas Perhubungan;
- d) Dinas Komunikasi dan Informasi;
- e) Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan V Koto, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuak Aluang; dan

Sehingga seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman terkait Infrastruktur (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan).



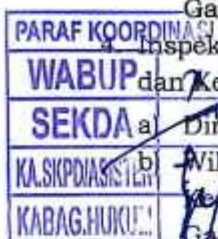
2. Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian:

- a) Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;

- d) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f) Sekretariat Daerah;
- g) Inspektorat;
- h) Dinas Perikanan;
- i) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- j) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- k) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai;
- l) Bank Perkreditan Rakyat; dan
- m) Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Koto Patamuan, Kecamatan Koto Padang Sago, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Anam Lingkuang.

3. Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat:

- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c) Dinas Kesehatan;
- d) Rumah Sakit Umum Daerah;
- e) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
- f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- i) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- m) Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.



4. Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari:

- a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kecamatan Sungai Garinggiang; dan
- c) Seluruh Nagari (103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman).

5. Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat:

- a) Seluruh Perangkat Daerah;
- b) Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Ulakan Tapakih; dan

c) Seluruh Nagari (103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman) termasuk BUMNag.

c. Nama-nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Berdasarkan Bidang Pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman:

1. Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:

| No. | Nama                        | Jabatan              |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 1.  | ELLINOPITA, S.E             | Auditor Ahli Madya   |
| 2.  | NURPEN HERIANDES, S.T, QRM0 | Auditor Ahli Pertama |
| 3.  | FEVIOIRA SUSANTI, S.E       | Auditor Ahli Pertama |
| 4.  | DESSY MAYASARI, S.T         | PPUPD Ahli Pertama   |
| 5.  | SILVIA ARINANDI, S.T        | PPUPD Ahli Pertama   |
| 6.  | DARMADI, S.E                | PPUPD Ahli Pertama   |

2. Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian:

| No. | Nama                           | Jabatan              |
|-----|--------------------------------|----------------------|
| 1.  | ELI MARNI, S.Sos, M.M          | PPUPD Ahli Madya     |
| 2.  | LISA SEFITTA, S.Sos, M.M, CRMO | Auditor Ahli Madya   |
| 3.  | ELINDA DESWATI, S.E            | PPUPD Ahli Madya     |
| 4.  | SUNARIYATI, S.E, QRMA          | Auditor Ahli Muda    |
| 5.  | ELMISON, S.E, MPA              | PPUPD Ahli Muda      |
| 6.  | SARASWATI FAUZIA, S.Tr. Ak     | Auditor Ahli Pertama |

3. Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat:

| No. | Nama                                    | Jabatan              |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|
| 1.  | TRISNA DEWI BUSTI, S.Si, Apt, M.M, CRMP | PPUPD Ahli Madya     |
| 2.  | BUDI MAISAL PUTRA, S.T, QRMA            | PPUPD Ahli Madya     |
| 3.  | NENI EMILDA, S.K.M, M.M                 | PPUPD Ahli Madya     |
| 4.  | NANDA FAULANA SAPUTRA, S.E, CFA, CTT    | Auditor Ahli Pertama |
| 5.  | VELIA YOLANDA, S.E                      | Auditor Ahli Pertama |
| 6.  | YOLA GUSTANTIA, S.Sos                   | Auditor Ahli Pertama |
| 7.  | JEFRIZAL, S.Tr.I.P                      | PPUPD Ahli Pertama   |

PARAF KOORDINASI  
WABUP  
SEKDA  
KASIKPD/ASISTEN  
KABAG.HUKUM

4. Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari:

| No. | Nama                           | Jabatan            |
|-----|--------------------------------|--------------------|
| 1.  | INDRAWATI HOSTINA, S.E, Ak, CA | Auditor Ahli Madya |
| 2.  | AGUSMAN, S.Sos, M.M            | Auditor Ahli Madya |
| 3.  | RISMAYATI, S.E, M.M            | PPUPD Ahli Madya   |

|    |                              |                   |
|----|------------------------------|-------------------|
| 4. | PRIRAMA DISKA, SKM, M.Biomed | PPUPD Ahli Madya  |
| 5. | ADHARI, S.E                  | Auditor Ahli Muda |
| 6. | RIRA NABILAH, S.H, M.I.Kom   | PPUPD Ahli Muda   |

5. Inspektur Pembantu Dacrah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat:

| No. | Nama                     | Jabatan              |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 1.  | ALFIAN, S.E, M.Si, CFrA  | Auditor Ahli Madya   |
| 2.  | FAUZANI, SAP, M.Si, QRMP | PPUPD Ahli Madya     |
| 3.  | WILLY INDRA, S.T, CFrA   | Auditor Ahli Pertama |
| 4.  | ALITA PRATIWI YUSRA, S.E | Auditor Ahli Pertama |
| 5.  | ZULDA HANDAYANI, S.E     | Auditor Ahli Pertama |
| 6.  | WAHYUNI, S.E., FRMP      | Auditor Ahli Pertama |

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| WABUP            | 71 |
| SEKDA            |    |
| KASIKPDIASISTEN  |    |
| KABAG.HUKU...    |    |

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
JOHN KENEDY AZIS

REKAPITULASI PROJEKSI KEBAYAAN PERSAWAHAN TAHUNAN POKTJ BUDIDAYA KESINO TAHUN 2026

LAMPIRAN II  
KONTROL DOKUMEN PAKAR INJENIRAN  
NO. 001 / 2026/10/2026  
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2026  
REKAPITULASI PROJEKSI KEBAYAAN PERSAWAHAN TAHUNAN INSTANSI TAHUN 2026

| No | Area Pengawasan                                   | Jenis Pengawasan             | Tujuan/Isu                                                                                                         | Prinsip Lingkup         | Jumlah             |                    |    |    |    |    | Anggaran |     | Luas dan   |    | Referensi |                        |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----|----|----|----|----------|-----|------------|----|-----------|------------------------|
| 11 | Area Pengawasan                                   | Jenis Pengawasan             | Tujuan/Isu                                                                                                         | Prinsip Lingkup         | HR                 | HR                 | HR | HR | HR | HR | HR       | HR  | HR         | HR | HR        | Referensi              |
| 1  | Revisi POKT tahunan IV tahun 2024                 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 5  | 5  | 5  | 5  | 25       | 40  | 5.000.000  | 1  | 1         | Item III               |
| 2  | Revisi Tahun IV tahun 2024                        | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1        | 3   | 650.000    | 1  | 1         | Item II                |
| 3  | Revisi dan POKT tahunan 2026                      | Revisi dan POKT tahunan 2026 | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 2  | 15 | 15 | 20 | 50       | 120 | 15.000.000 | 1  | 1         | Item I, II, III, IV, V |
| 4  | Evaluasi Reformasi Budidaya Tanaman IV Tahun 2025 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M IV Januari 2026  | M IV Januari 2026  | 2  | 0  | 3  | 5  | 10       | 25  | 3.540.000  | 1  | 1         | Item III               |
| 5  | Jasa Asesor/Perbaikan                             | Jasa Asesor/Perbaikan        | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 1  | 1  | 2  | 3  | 0        | 5   | 1          | 1  | 1         | Item I, II, III, IV    |
| 6  | Audit UPT                                         | Audit                        | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M III Januari 2026 | M III Januari 2026 | 3  | 20 | 20 | 20 | 120      | 250 | 34.500.000 | 3  | 3         | Item I, II, III, IV, V |
| 7  | Pengawasan Pengawasan                             | Audit Tahunan                | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 1  | 0  | 0  | 0  | 10       | 20  | 4.770.000  | 1  | 1         | Item V                 |
| 8  | Revisi POKT tahunan IV tahun 2024                 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 3  | 10 | 10 | 10 | 40       | 70  | 9.800.000  | 1  | 1         | Item                   |
| 9  | Revisi POKT tahunan IV tahun 2024                 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1        | 2   | 650.000    | 1  | 1         | Item II                |
| 10 | Revisi POKT tahunan IV tahun 2024                 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 5  | 10 | 10 | 10 | 50       | 90  | 11.800.000 | 1  | 1         | Item III               |
| 11 | Revisi POKT tahunan IV tahun 2024                 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 5  | 17 | 17 | 17 | 130      | 117 | 24.310.000 | 1  | 1         | Item II                |
| 12 | Revisi POKT tahunan IV tahun 2024                 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 3  | 0  | 0  | 2  | 40       | 60  | 3.530.000  | 1  | 1         | Item II                |
| 13 | Revisi POKT tahunan IV tahun 2024                 | Revisi                       | Membuat dan mengembangkan rencana kerja tahunan dan pengembangan yang ada pada Persawahan Desa yang terdapat di... | Seluruh Persawahan Desa | M I Januari 2026   | M I Januari 2026   | 3  | 12 | 12 | 12 | 90       | 112 | 17.410.000 | 1  | 1         | Item II                |



|    |                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                 |                 |   |    |    |    |     |     |   |            |     |              |                        |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|----|----|----|-----|-----|---|------------|-----|--------------|------------------------|
| 28 | Evaluasi (akhir) Penanggulangan Daerah            | Indikator                | Mengidentifikasi berbagai kebutuhan dalam penanganan wabah akibat bencana banjir dan memberikan saran perbaikan serta rekomendasi untuk penanggulangan banjir dan pengurangan kerusakan di lingkungan tersebut. | Seluruh Penanggulangan Daerah                                  | M II April 2020 | M IV April 2020 | 5 | 17 | 17 | 12 | 103 | 153 |   | 20.070.000 | 1   | Laporan, ATK | Item III               |
| 29 | Berita India Bulan April                          | Media                    | Kerangka dan rekomendasi untuk rencana kerja dalam penanganan wabah akibat bencana banjir.                                                                                                                      | Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam                        | M I April 2020  | M I April 2020  | 1 | 1  | 1  | 1  | 1   | 3   |   | 630.000    | 1   | Laporan, ATK | Item II                |
| 30 | Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Banjir | Monitoring dan Evaluasi  | Penyusunan Timbal Balik Rencana Kerja dan Pelaksanaan Indikator dan Indikator Terapan II                                                                                                                        | Seluruh Penanggulangan Daerah dan Negara                       | M I April 2020  | M I April 2020  | 1 | 0  | 0  | 0  | 30  | 48  |   | 6.325.000  | 1   | Laporan, ATK | Item                   |
| 31 | Penanganan Banjir April 2020                      | Audit Tahunan            | Urut mendeskripsikan dan memvisualisasikan penanganan banjir.                                                                                                                                                   | Penanganan Banjir                                              | M I April 2020  | M IV April 2020 | 1 | 0  | 0  | 0  | 18  | 30  |   | 4.770.000  | 1   | Laporan, ATK | Item V                 |
| 32 | Monitoring dan Evaluasi Penanganan Banjir         | Monitoring dan Evaluasi  | Urut mendeskripsikan kegiatan rencana kerja dalam penanganan wabah akibat bencana banjir, proses, sistem, fungsi, dan indikator yang relevan dengan penanganan banjir yang telah ditetapkan.                    | Seluruh Penanggulangan Daerah/Bulan Laporan Utama Daerah/Bulan | M I April 2020  | M IV April 2020 | 3 | 3  | 7  | 7  | 7   | 20  |   | 4.080.000  | 1   | Laporan, ATK | Item                   |
| 33 | Berita DAK                                        | Berita                   | Membaca dan memahami berita dalam berbagai media massa, cetak, elektronik, dan media sosial yang relevan dengan penanganan banjir yang telah ditetapkan.                                                        | Penanganan Bencana Banjir                                      | M I April 2020  | M IV April 2020 | 5 | 29 | 20 | 20 | 40  | 100 | 0 | 0          | 5   | Laporan, ATK | Item I, II, III, IV, V |
| 34 | Jasa Asuransi/Keasuransi                          | Jasa Asuransi/Keasuransi | Membaca dan memahami berita dalam berbagai media massa, cetak, elektronik, dan media sosial yang relevan dengan penanganan banjir yang telah ditetapkan.                                                        | Keasuransi/Keasuransi Daerah/Bulan Laporan Utama Daerah/Bulan  | M I April 2020  | M IV April 2020 | 1 | 1  | 2  | 3  | 0   | 3   |   | 0          | 1   | Laporan, ATK | Item I, II, III, IV, V |
| 35 | Berita India Bulan Mei                            | Media                    | Kerangka dan rekomendasi untuk rencana kerja dalam penanganan wabah akibat bencana banjir.                                                                                                                      | Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam                        | M I April 2020  | M I April 2020  | 1 | 1  | 1  | 1  | 1   | 3   |   | 630.000    | 1   | Laporan, ATK | Item II                |
| 36 | Audit keuangan negara                             | Audit keuangan           | Membaca dan memahami berita dalam berbagai media massa, cetak, elektronik, dan media sosial yang relevan dengan penanganan banjir yang telah ditetapkan.                                                        | 50 Negara                                                      | M I Mei 2020    | M IV April 2020 | 7 | 30 | 30 | 60 | 120 | 120 |   | 33.430.000 | 103 | Laporan, ATK | Item IV                |
| 37 | Penanganan Banjir                                 | Audit Tahunan            | Urut mendeskripsikan dan memvisualisasikan penanganan banjir.                                                                                                                                                   | Penanganan Banjir                                              | M I Mei 2020    | M IV Mei 2020   | 1 | 0  | 0  | 0  | 18  | 30  |   | 4.770.000  | 1   | Laporan, ATK | Item V                 |
| 38 | Audit keuangan                                    | Audit keuangan           | Urut mendeskripsikan dan memvisualisasikan penanganan banjir.                                                                                                                                                   | Keasuransi/Keasuransi Daerah/Bulan                             | M I Mei 2020    | M III Mei 2020  | 3 | 10 | 10 | 10 | 20  | 50  |   | 7.080.000  | 3   | Laporan, ATK | Item I                 |
| 39 | Audit keuangan                                    | Audit keuangan           | Urut mendeskripsikan dan memvisualisasikan penanganan banjir.                                                                                                                                                   | Keasuransi/Keasuransi Daerah/Bulan                             | M I Mei 2020    | M III Mei 2020  | 5 | 10 | 10 | 10 | 20  | 50  |   | 7.080.000  | 3   | Laporan, ATK | Item III               |
| 40 | Berita SSB dan ASD                                | Media                    | Membaca dan memahami berita dalam berbagai media massa, cetak, elektronik, dan media sosial yang relevan dengan penanganan banjir yang telah ditetapkan.                                                        | Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam                        | M I Mei 2020    | M III Mei 2020  | 2 | 7  | 7  | 7  | 14  | 35  |   | 4.080.000  | 3   | Laporan, ATK | Item II                |
| 41 | Jasa Asuransi/Keasuransi                          | Jasa Asuransi/Keasuransi | Membaca dan memahami berita dalam berbagai media massa, cetak, elektronik, dan media sosial yang relevan dengan penanganan banjir yang telah ditetapkan.                                                        | Keasuransi/Keasuransi Daerah/Bulan                             | M I Mei 2020    | M IV Mei 2020   | 1 | 1  | 3  | 3  | 0   | 5   |   | 0          | 1   | Laporan, ATK | Item I, II, III, IV, V |



|    |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |              |              |   |    |    |    |    |     |            |   |           |                        |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|----|----|----|----|-----|------------|---|-----------|------------------------|
| 56 | Audit Investasi                                   | Audit Tahunan Tertentu | Untuk memeriksa dan melaporkan kebenaran laporan                                                                                                                                                                                                         | Pengadilan Masyarakat                                           | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 1 | 15 | 15 | 15 | 43 | 50  | 11.390.000 | 4 | Lamp. ATK | Item V                 |
| 59 | Pengawasan Pengeluaran Masyarakat Bulat Juli 2015 | Audit Tahunan Tertentu | Untuk mengetahui dan melaporkan kebenaran pengeluaran                                                                                                                                                                                                    | Pengadilan Masyarakat                                           | 14 Juli 2015 | 14 Juli 2015 | 1 | 6  | 6  | 6  | 18 | 36  | 4.770.000  | 1 | Lamp. ATK | Item V                 |
| 60 | Evaluasi STPP                                     | Evaluasi               | Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan sistem pengendalian internal perusahaan dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan pengisian STPP di Pemerintah Daerah.                                         | Sekolah Pengabdian Daerah                                       | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 10 | 10 | 10 | 60 | 90  | 11.660.000 | 1 | Lamp. ATK | Item III               |
| 61 | Jasa Aspek Rancangan                              | Jasa Konsultansi       | Memberikan petunjuk dan arahan mengenai prosedur dan tata laksana proses penganggaran hingga dan tahap investasi (prosedur)                                                                                                                              | Sekolah Pengabdian Daerah Kecamatan dan Nagari                  | 14 Juli 2015 | 14 Juli 2015 | 1 | 2  | 2  | 2  | 6  | 3   |            | 1 | Lamp. ATK | Item I, II, III, IV, V |
| 62 | Rentu DAK Tahap I                                 | Rentu                  | Membantu pemerintah daerah dalam melakukan laporan kerja secara lengkap terintegrasi dengan sistem keuangan daerah (SISKEUDA) untuk memudahkan dan mempercepat proses pengajuan DAK Tahap I serta dalam pengisian DAK Tahap I secara lengkap dan akurat. | Pengabdian Daerah Kecamatan Duta Utara Kecamatan Pesisir Tengah | 14 Juli 2015 | 14 Juli 2015 | 5 | 40 | 40 | 40 | 80 | 200 | 0          | 5 | Lamp. ATK | Item I, II, III, IV, V |
| 63 | Rentu RUPD Perubahan 2016                         | Rentu                  | Untuk melaksanakan RUPD Perubahan dengan memberikan bimbingan teknis mengenai anggaran, keuangan dan kepelatihan.                                                                                                                                        | Sekolah Pengabdian Daerah                                       | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 3  | 3  | 3  | 24 | 33  | 5.230.000  | 1 | Lamp. ATK | Item II                |
| 66 | Rentu Laporan Tahunan Anggaran                    | Rentu                  | Membantu dan memastikan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi                                                                                                                                                                          | Dagang Perencanaan dan Sumber Daya Alam                         | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 3   | 6.50.000   | 1 | Lamp. ATK | Item II                |
| 67 | Rentu KUA PIVAS tahun 2017                        | Rentu                  | Untuk memastikan kualitas KUA PIVAS dengan memberikan bimbingan teknis mengenai akurasi, keabsahan dan keabsahan.                                                                                                                                        | Sekolah Pengabdian Daerah                                       | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 3  | 3  | 3  | 23 | 33  | 5.230.000  | 1 | Lamp. ATK | Item II                |
| 68 | Rentu Pengabdian Daerah                           | Rentu                  | Untuk memberikan bimbingan teknis proses pengabdian masyarakat dengan memberikan bimbingan teknis mengenai anggaran, keuangan dan kepelatihan.                                                                                                           | Sekolah Pengabdian Daerah                                       | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 3  | 3  | 3  | 6  | 15  | 2.170.000  | 1 | Lamp. ATK | Item II                |
| 69 | Rentu Manajemen ASN                               | Rentu                  | Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.                                                                                                                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia          | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 3  | 3  | 3  | 6  | 15  | 2.170.000  | 1 | Lamp. ATK | Item II                |
| 70 | Rentu Tata Kelola DAKD                            | Rentu                  | Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan sistem pengendalian internal perusahaan dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan pengisian STPP di Pemerintah Daerah.                                         | Badan Pengada Jasa                                              | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 3  | 3  | 3  | 6  | 15  | 2.170.000  | 1 | Lamp. ATK | Item II                |
| 71 | Rentu Pelaksanaan Publikasi                       | Rentu                  | Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan sistem pengendalian internal perusahaan dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan pengisian STPP di Pemerintah Daerah.                                         | Badan Pengada Jasa                                              | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 3  | 3  | 3  | 6  | 15  | 2.170.000  | 1 | Lamp. ATK | Item III               |
| 72 | Rentu Pelaksanaan Publikasi                       | Rentu                  | Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan sistem pengendalian internal perusahaan dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan pengisian STPP di Pemerintah Daerah.                                         | Badan Pengada Jasa                                              | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 | 2 | 3  | 3  | 3  | 6  | 15  | 2.370.000  | 1 | Lamp. ATK | Item III               |







|            |                                                         |                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |   |   |   |   |    |     |           |   |              |         |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|----|-----|-----------|---|--------------|---------|
| 109        | Monitoring MCF KTR: Triwulan IV Tahun 2020              | Monitoring dan Evaluasi | Memonitoring bahwa 8 area prioritas terdapat indikator yang konsisten dan berkembang dengan baik                                                                | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Dinas Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Dinas Perencanaan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | M IV Des 2020  | II IV Des 2020  | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25  | 3.620.000 | 1 | Laportg. ATK | Item V  |
| 110        | Pengembangan Pengabdian Masyarakat: Bulan Desember 2020 | Audit Tujuan Terorisme  | Untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan pengabdian                                                                                                          | Pengabdian Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M I Des 2020   | II IV Des 2020  | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 30  | 4.770.000 | 1 | Laportg. ATK | Item V  |
| 111        | Revisi POKJA Triwulan IV Tahun 2020                     | Revisi                  | Melakukan analisis terhadap pengabdian masyarakat dan pengabdian barang dan jasa yang dilakukan dan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan pada triwulan IV | Seluruh Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M III Des 2020 | II III Des 2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3  | 6   | 1.100.000 | 1 | Laportg. ATK | Item II |
| Jumlah 112 |                                                         |                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |   |   |   |   |    | 634 | 9.770.000 |   |              |         |

BUKTI PANGKAP PARAGRAF

JOHN KENEDY AZIN

|                   |  |
|-------------------|--|
| PARAF KOORDINATOR |  |
| WABUP             |  |
| SEKDA             |  |
| KASIPOLASISTEN    |  |
| KABAGHUK          |  |